BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Menurut pembahasan dan penjelasan di atas., maka penulis dapat menarik kesimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan program KKB bagi TPD/TPK cukup efektif, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sasaran program KKB nasional bisa dikatakan berhasil karena para TPD/TPK yang mensosialisaikan program KKB telah mencapai indikator kinerja sesuai kontrak dengan BKKBN pusat dan masyarakat bisa memahami, menerima dengan terbuka program KKB ini.
2. Tujuan diklat program KKB ini untuk berlangsungnya program KKB yang terencana, terstruktur dan berkelanjutan. Dan dengan lancar bisa tersampaikannya informasi teknis maupun politis yang berkaitan dengan pengelolaan program KKB kepada masyarakat yang ingin ber-KB
3. Hasil diklat ini bisa meningkatkan kemampuan dan kompetensi TPD/TPK dalam mensosialisasikan program KKB ke seluruh pelosok Jawa Barat dan para TPD/TPK dapat memahami rencana operasional yang akan dilaksanakan dan bekerja sebagai satu tim kerja.
4. Evaluasi hasil diklat ini diperlukan untuk menilai para peserta diklat agar bisa dijadikan acuan untuk lebih baik lagi dan sangat berguna untuk pelaksanaan diklat berikutnya agar lebih baik dan lancar.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. BKKBN sebagai institusi pemerintah yang didirikan untuk mengatasi masalah kependudukan maka harus dilakukan upaya pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya.
2. Diharapkan BKKBN bisa melaksanakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian (pengarahan mobilitas penduduk) dengan baik dan lancar.

3. Dengan adanya program KKB ini, sebaiknya bisa meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4. BKKBN harus melakukan Penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.
5. Masalah kependudukan bukan hanya tanggung jawab BKKBN saja, tetapi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus saling bekerjasama dalam mengatasi masalah kependudukan ini.
6. Pemerintah harus berkomitmen tinggi untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.
7. Diharapkan kepada Pemerintah agar semua warga negara mempunyai hak untuk mencapai pendidikan 12 tahun.
8. Sebaiknya BKKBN harus mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
9. Diharapkan BKKBN bisa meningkatkan kesehatan Ibu.
10. Pemerintah haru bisa Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya agar angka kesehatan masyarakat bisa meningkat.
11. Program KKB harus terus dilanjutkan untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan.
12. Tenaga Penggerak Desa/Tenaga Penggerak Kelurahan (TPD/TPK) memiliki peran penting untuk keberhasilan program KKB, maka TPD/TPK harus diberi penghargaan atas kerja kerasnya dalam mengatasi masalah kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Fathonah Siti. 2012*. Penggerak Buku Pegangan Tenaga Desa/Kelurahan*. Bandung:Gramedia.

Yuni Satria. 2005. *Pengelolaan Program Pendidikan dan Pelatihan yang Profesional.* Bandung:Pusat Pelatihan Pegawai dan Tenaga Program.

Syarief Sugiri. 2007. KB *Untuk Semua*. Jakarta:Gramedia.

Sri Murtiningsih. 2008. *Subsistem Pendidikan dan Pelatihan Program KB Nasional.* Jakarta:BKKBN.

Sri Murtiningsih. 2008. *Subsistem Pelatihan dan Pelatihan Program KB Nasional.* Jakarta:BKKBN.

Atmodiwirio,S. 2007. *Manajemen Pelatihan*. Jakarta:Aedadizya Jaya.

Ari Kuncoro. 2007. *Informasi Dasar Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*. Jakarta:Airlangga.

Moh. Arsyad. 2009. *Informasi Gerakan KB Nasional Selama Pembangunan Jangka Panjang*. Jakarta:Airlangga.

Fathonah Siti. 2012. *Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Program KKB Bagi Tenaga penggerak desa/Tenaga penggerak Kelurahan (TPD/TPK)*. Bandung:Gramedia.

Hull Terrence Valerie. 2006. *Masyarakat, Kependudukan dan Kebijakan di Indonesia.* PT. Equinox Publlishing Indonesia.

Effendy. 2003. *Teori-teori Efektifitas*. Bandung:Gramedia.

Richard M Steers. 2009. *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*. Jakarta:Airlangga.

Dokumen-Dokumen :

Undang-Undang No 10/2010 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Peraturan 62 tahun Presiden Nomor 2010, tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Keputusan Kepala BKKBN Nomor/HK-010/IV/1994, tentang uraian pekerjaan bagi eselon III, IV dan V di wilayah, Jakarta 1994.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Kewenangan Wajib BKKBN.

Undang-Undang No 52 Th 2009 Tentang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Rujukan Elektronik :

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana. 2012 Melalui http://www.bkkbn.go.id/ article/bkkbn.html [20/5/12]

Pengertian Tenaga Penggerak Desa atau kelurahan. Melalui http://www.bkkbn.go.id/ program/data/bkkbn.html [20/6/12]

Pengertian Kependudukan dan Keluarga Berencana. 2012. . Melalui http://www.bkkbn.go.id/program/data/bkkbn.html [20/6/12]

Poko-pokok Pengelolaan Diklat. Melalui http://www.bkkbn.go.id/program/ data/bkkbn.html [22/6/12]